

PENGARUH PRAKTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BESARAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Vina Herliana

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

vinaherliana@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Corporate Governance practices on the magnitude of Related Party Transactions (RPT) and financial performance listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This research used manufacturing companies with concentrated share ownership in the 2012 – 2016 period as a research sample and uses the MANOVA test, these results indicate that the practice of Corporate Governance does not affect the magnitude of Related Party Transactions. Besides that, the practice of Corporate Governance affects financial performance.

Keywords: *Corporate Governance, Related Party Transactions, Financial Performance*

PENDAHULUAN

Corporate Governance diterapkan untuk menciptakan budaya kesadaran, transparan atau keterbukaan dari perusahaan untuk para pemegang saham ataupun pemangku kepentingan lainnya. Lukviarman (2016) mengatakan bahwa perdebatan terkini tentang isu *governance* terutama yang berkaitan dengan isu *Corporate Governance* adalah terdapat dua paradigma yang berlawanan antara *shareholding* dan *stakeholding*. Berdasarkan undang-undang perseroan, ciri sistem dan model *governance* yang diadopsi Indonesia lebih mengacu kepada model *Continental European* yaitu perspektif *stakeholding* dipercaya akan lebih sesuai. Hal ini tidak berarti bahwa perspektif *shareholding* tidak sesuai sebagai paradigma yang digunakan dalam memahami fenomena *Corporate Governance* di Indonesia (Lukviarman, 2016). Tujuan

utama perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemiliknya atau para pemegang saham, dan memaksimalkan kekayaan melalui peningkatan kinerja (Adi Setiawan dan Fitria, 2015). Penerapan *Corporate Governance* memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan melakukan pengawasan kinerja manajemen dalam rangka memberikan jaminan akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*, dan juga menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, meliputi rangkaian dari hubungan yang terjadi pada manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya (OECD, 1999).

Banyak perusahaan privat maupun *go-public* di Indonesia diatur dan dimiliki oleh keluarga pendiri, seperti pendapat dari Lukviarman (2016) bahwa untuk kasus di Indonesia diungkapkan sebesar 71% kepemilikan perusahaan yang telah *go public* terkonsentrasi pada keluarga (*family ownership*). Kepemilikan keluarga menyebabkan kontrol manajemen secara mayoritas berada pada kendali anggota keluarga dan rekan bisnis yang dipercayai. Sesuai dengan PSAK 15 jika entitas memiliki 20% atau lebih hak suara (*voting*) atas perusahaan maka entitas secara tidak langsung berpengaruh signifikan.

Menurut Shinta (2011) kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki keuntungan dalam melakukan kontrol manajemen, tetapi memiliki potensi yang menimbulkan kerugian untuk perusahaan karena dapat menurunkan nilai perusahaan. Kondisi tersebut diperkuat dengan pemikiran Lukviarman (2016:121) yang menyatakan bahwa investor kecil dan umum dengan kepemilikan relatif kecil tidak memiliki kekuatan efektif, bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri dari supremasi pemegang saham

mayoritas yang berada pada posisi yang kuat, dan lemahnya perlindungan hukum untuk investor kecil tersebut.

Terjadinya transaksi kepada pihak-pihak yang berelasi (hubungan istimewa) akan sangat besar pula, hal ini dijelaskan dalam pernyataan Handayani (2014) bahwa di Indonesia kebanyakan perusahaan memiliki grup perusahaan yang dikarenakan adanya kepemilikan saham ataupun keterkaitan kepentingan, yang terjadi pada perusahaan induk dan anaknya ataupun dengan cabang perusahaan yang disebut pula sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (*related parties*). Terdapat dua studi empiris mengenai transaksi dengan pihak berelasi (RPT) yaitu yang bersifat merugikan (*abusive related party transaction* berdasarkan *the conflict of interest hypothesis*) atau yang bersifat menguntungkan (*efficient related party transaction* berdasarkan *the efficient transaction hypothesis*) (Utama, 2015). Besaran RPT yang terungkap dalam laporan tahunan merupakan jumlah dari besaran *abusive* RPT dan *efficient* RPT. Jika praktik *Corporate Governance* terlaksana dengan baik maka dapat menurunkan besaran RPT (Utama, 2015). Dalam kenyataannya masih ditemui penyimpangan dari prinsip atau praktik *Corporate Governance* di perusahaan *go-public* di Indonesia.

Contoh perusahaan yang melakukan penyimpangan prinsip *Corporate Governance* adalah dilansir oleh Kontan pada tanggal 2 Agustus 2017 sebuah portal berita ekonomi bisnis dan investasi, bahwa saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kembali tertekan sejak adanya sentimen negatif terhadap kelanjutan kasus dugaan penipuan penjualan beras yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT. Indo Beras Unggul (IBU), dan oleh karenanya tantangan AISA adalah bagaimana bisa

meningkatkan *public trust*, serta segera melakukan konsolidasi internal dalam rangka meningkatkan *Corporate Governance*. Terminologi *Corporate Governance* digunakan sebagai alat, mekanisme, dan struktur untuk mengetahui perilaku manajerial yang *self-serving/* menguntungkan diri pribadi dengan melakukan pembatasan perilaku *opportunistic* manajer, digunakan dalam melakukan perbaikan kualitas informasi perusahaan dan penataan hubungan untuk semua pihak agar kepentingannya dapat terpenuhi secara seimbang (Achyani, 2015). Kenyataannya masih ditemui direksi yang tidak menjalankan tugasnya berdasar dengan prinsip-prinsip tanggungjawab dan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, masih terdapat direktur yang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai direktur untuk memenuhi kepentingan pribadi, atau salah satunya dikenal dengan transaksi untuk diri sendiri (Ardiansyah, 2016).

Berdasarkan ulasan di atas maka penulis ingin meneliti pengaruh praktik *Corporate Governance* terhadap besaran transaksi pihak berelasi dan kinerja keuangan perusahaan terkonsentrasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang menggunakan topik *Corporate Governance* adalah menggunakan indeks *Corporate Governance* dari penelitian yang dilakukan oleh Chauhan (2016), dan indeks tersebut disesuaikan kembali dengan peraturan yang ada di Indonesia. Observasi pada penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur untuk periode tahun 2012 – 2016.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan, menunjukkan bahwa setiap organisasi (disebut dengan *the agent*) berperan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh seseorang maupun kelompok

(disebut *the principal*), sehingga keduanya saling berhubungan, hubungan tersebut dapat memicu terjadinya perbedaan kepentingan (*self interest*), sesuai dari sudut pandang keduanya (Lukviarman, 2016). Sedangkan Menurut Jensen dan Meckling keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya konflik (Jensen dan Meckling, 1976).

Related Party Transactions (RPT)

Related Party Transaction (RPT), berdasar PSAK 7 adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK 7 pihak-pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dimana, dalam transaksi pihak berelasi adanya pengendalian yang merupakan kepemilikan langsung anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari perusahaan, selain pengendalian juga terdapat pengaruh signifikan yang diperoleh karena adanya kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian.

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Sesuai dengan peraturan OJK nomor IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang diharuskan untuk dilaporkan pada publik adalah, pemegang saham independen atau yang mewakili sesuai wewenang yang telah diatur dalam RUPS wajib melakukan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan persetujuan harus dibuatkan akta notaris. RUPS telah menyetujui transaksi seperti yang dibahas tersebut, namun belum dilakukan pada jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka setelah mendapatkan persetujuan kembali dari RUPS transaksi tersebut dapat dilakukan.

Tipe – Tipe Transaksi Antar Pihak Berelasi

a. Berpotensi melakukan *tunneling* transaksi

1) Akuisisi aset

Transaksi akuisisi aset berwujud/tidak berwujud dari perusahaan terdaftar atau swasta. Transaksi ini digunakan untuk menopang perusahaan terdaftar jika dilakukan dengan harga di bawah nilai wajar aset.

2) Penjualan aset

Transaksi penjualan aset berwujud/tidak berwujud atau saham ekuitas oleh perusahaan terdaftar atau swasta. Transaksi ini digunakan untuk menopang perusahaan terdaftar jika dilakukan dengan harga di bawah nilai wajar aset.

3) Penjualan ekuitas

Transaksi yang terdiri atas penjualan saham ke pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut.

4) Hubungan perdagangan

Transaksi yang terdiri atas perdagangan barang dan jasa antara perusahaan terdaftar dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut.

5) Pembayaran kas

Transaksi yang terdiri atas pembayaran kas langsung ke pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut ataupun kepada anak perusahaan. Contoh transaksi pembayaran kas untuk utang oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan pihak tersebut adalah dengan pemberian pinjaman atau pemberian jaminan kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas.

6) Penjualan ekuitas

Transaksi yang terdiri atas penjualan saham ke pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut.

7) Hubungan perdagangan

Transaksi yang terdiri atas perdagangan barang dan jasa antara perusahaan terdaftar dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut.

8) Pembayaran kas

Transaksi yang terdiri atas pembayaran kas langsung ke pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan oleh pihak tersebut ataupun kepada anak perusahaan. Contoh transaksi pembayaran kas untuk utang oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikendalikan pihak tersebut adalah dengan pemberian pinjaman atau pemberian jaminan kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas.

b. Transaksi yang memberikan keuntungan pemegang saham nonpengendali

1) Penerimaan kas

Melibatkan penerimaan kas atau pinjaman yang telah disiapkan oleh pihak berelasi pada perusahaan terdaftar.

2) *Subsidiary relationship*

Transaksi antar perusahaan terdaftar dan anak perusahaannya, seperti akuisisi dan penjualan saham atau aset dan transaksi perdagangan.

c. Transaksi yang didasari oleh alasan strategis dan bukan merupakan ekspropriasi

1) *Takeover offers* dan *joint ventures*

Menerima tawaran *takeover* dari perusahaan lain yang sudah terdaftar dan membentuk *joint venture* atau *strategic alliance* dengan perusahaan lain yang sudah mempunyai saham di perusahaan publik.

Kontrol dan Pengawasan Perusahaan – Perusahaan Terbuka di Indonesia

Kepemilikan ditujukan sebagai bentuk kekuasaan dalam melakukan pengawasan atau kontrol yang nantinya terdapat kemampuan dalam menetapkan kebijakan serta tindakan di perusahaan (Sugiarto, 2009). Menurut Berle & Means (dalam Sugiarto, 2009) terdapat lima tipe kontrol sebagaimana tertera di bawah ini:

Tabel 1. Tipe – Tipe Kontrol

1.	<i>Private ownership Control</i>	80% atau lebih dari saham yang dimiliki oleh individu atau sekelompok rekan bisnis
2.	<i>Majority Control</i>	50 - 80% dipegang oleh beberapa orang
3.	<i>Minority Control</i>	20-50% kepemilikan saham
4.	<i>Management Control</i>	<20% kepemilikan saham
5.	<i>Legal Control</i>	piramida, ini melibatkan kepemilikan mayoritas saham dari satu perusahaan, yang pada gilirannya memegang mayoritas saham dari proses lain, yang dapat, diulang beberapa kali

Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Horne (1998) ukuran prestasi perusahaan merupakan hasil dari kinerja keuangan yang baik, oleh karenanya keuntungan digunakan sebagai alat oleh manajer. Kinerja keuangan memberikan deskripsi dari penggunaan hasil dana atau keuntungan yang dicapai melalui perbandingan antara pendapatan bersih setelah pajak dengan aset perusahaan.

Pengaruh Praktik *Corporate Governance* terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi

Terdapat studi empiris memberikan dua teori bertolak belakang mengenai *Related Party Transaction* (RPT), yaitu “*the efficient transaction hypothesis*” dan “*the conflict of the interest hypothesis*”(Utama, 2015). *Efficient RPT* menjelaskan bahwa RPT dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena transaksi tersebut memiliki keuntungan yang secara rasional dan ekonomis yaitu dapat memperkecil biaya transaksi yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Alasannya, transaksi dilakukan antara pihak yang berada pada satu kendali sehingga dapat menurunkan biaya kontrak dan proses negosiasi dapat dilakukan secara cepat, dibandingkan dengan transaksi dengan non-RPT Friedman (dalam Utama, 2015). Selain itu, terdapat *abusive RPT* yang dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk mengambil alih kas dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling activities* yang dapat merugikan pihak minoritas Chang & Hong (dalam Utama, 2015).

Pernyataan yang diungkapkan oleh Utama & Utama (dalam Utama, 2015) bahwa besaran RPT yang tertera pada laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh praktik *Corporate Governance* perusahaan dan dipengaruhi oleh tingkat pelaporan transaksi pihak berelasi. Sehingga, apabila praktik *Corporate Governance* perusahaan dapat berjalan dengan baik maka tindakan *abusive RPT* dapat menurun dan tingkat RPT akan cenderung menurun. Penelitian juga dilakukan oleh (Chauhan et al., 2016) yang menunjukkan bahwa praktik *Corporate Governance* yang baik menyebabkan lebih sedikit transaksi mandiri dan akhirnya akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Penelitian Yeh et al (2012) menunjukkan hasil bahwa *Corporate Governance* yang baik

dapat memperbaiki penggunaan RPT dengan kata lain bahwa *Corporate Governance* yang baik efektif dalam menghambat RPT dengan hubungan yang negatif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Praktik *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi (RPT)

Pengaruh Praktik *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Untuk kasus di Indonesia atau pada negara berkembang lainnya, terdapat beberapa perangkat pengendalian korporasi tidak berfungsi secara optimal, dikarenakan kepemilikan perusahaan terkonsentrasi di tangan sekelompok keluarga yang memiliki pengendalian kuat sebagai pemegang saham mayoritas (Lukviarman, 2016). Konflik yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan minoritas adalah dimana pihak mayoritas dapat memberikan pengaruh atas disepakatinya keputusan korporasi yang diperkirakan dapat menguntungkan kelompok mereka, sementara biaya keagenan ditanggung oleh pemilik minoritas (Lukviarman, 2016). Dalam kasus tersebut, dapat diperkirakan bahwa pemilik pendiri cenderung memiliki praktik *Corporate Governance* yang kurang ketat, sehingga memfasilitasi mengambil alih pemegang saham minoritas.

Keberadaan pemegang saham mayoritas di sisi lain juga dapat memberikan keuntungan untuk korporasi, dan pada akhirnya keuntungan tersebut akan memberikan manfaat yang dirasakan menyeluruh oleh semua pemegang saham (Lukviarman, 2016). Alasannya adalah terdapat efek dari insentif dengan pola kepemilikan tersebut yang akan mengurangi kebutuhan pengawasan dan supervisi dari pihak lainnya di luar perusahaan, sehingga akan mengurangi *monitoring cost* sebagai salah satu komponen biaya keagenan, manfaat lainnya melalui pemegang saham pengendali akan dirasakan

oleh perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok bisnis (Lukviarman, 2016). Manfaat ini dihasilkan dengan cara pemanfaatan transfer dana secara internal guna mengatasi ketidakefisienan pasar modal dalam menyediakan sumber pembiayaan sebagaimana ditemukan di berbagai negara berkembang (Lukviarman, 2016).

Sesuai dengan hasil penelitian dari Chauhan et al (2016) bahwa *Corporate Governance* meningkatkan kinerja perusahaan dan efek ini lebih menonjol pada perusahaan yang memiliki kepemilikan tinggi, penelitian lain juga telah dilakukan oleh (Adi Setiawan & Fitria, 2015) dimana kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat maka kinerja juga akan meningkat dan penelitian dari Kumaat (2013) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Achyani, 2015) menunjukkan kualitas *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan terkonsentrasi

METODE PENELITIAN

Dalam menentukan dan mengambil sampling penelitian, *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2006: 56). Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kepemilikan saham terkonsentrasi lebih dari 50% dan periode penelitian pada tahun 2012 hingga 2016.

Sehingga hasil dari sampling terdapat 52 perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua variabel dependen dalam penelitian yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Besaran RPT, dengan menambahkan jumlah aset dan kewajiban yang berhubungan dengan RPT, kemudian dibagi dengan ekuitas perusahaan yang berasal dari laporan posisi keuangan, nantinya variabel RPT akan dikonversi kedalam bentuk Lg10 (RPT):

$$RPT = \frac{RPT_{assets} + RPT_{liabilities}}{\text{total ekuitas}}$$

2. ROA, perbandingan antara laba/rugi selisih kurs dengan laba rugi sebelum pajak, nantinya variabel ROA akan dikonversi kedalam bentuk Lg10 (ROA):

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}}$$

Praktik *Corporate Governance* dalam penelitian ini sebagai variabel independen yang diukur menggunakan indeks *Corporate Governance* sesuai dengan rujukan yang dibuat dari klausul di India, kemudian indeks disesuaikan dengan peraturan di Indonesia. Kemudian telah diidentifikasi dan diuji kembali reliabilitas dan validitasnya, sehingga terdapat tiga puluh atribut perusahaan, yang nantinya masing-masing diberi nilai “1” jika perusahaan melaporkan atribut tersebut dalam laporan tahunannya dan “0” jika tidak (Chauhan et al., 2016). Perusahaan dengan nilai praktik *Corporate Governance* di bawah median akan diberi simbol dengan angka “0” yang artinya “kurang”, perusahaan dengan nilai praktik *Corporate Governance* adalah sama dengan nilai median akan diberi simbol dengan angka “1” yang artinya “cukup” dan perusahaan dengan nilai praktik *Corporate Governance* di atas nilai rata – rata akan diberi simbol

dengan angka “2” yang artinya “baik”. Atribut yang telah diidentifikasi dikelompokkan menjadi enam sub indeks yaitu indeks RUPS, indeks dewan komisaris, indeks dewan direksi, indeks komite audit, komite remunerasi, dan indeks pengungkapan. Indeks *Corporate Governance* yang dibangun secara luas mencakup praktik *Corporate Governance* suatu perusahaan. Maka model persamaan MANOVA yang terbentuk adalah:

$$\text{Lg10}(RPT)_{it} + \text{Lg10}(ROA)_{it} = CG_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

RPT : Besaran RPT

ROA : Kinerja keuangan terkonsentrasi

CG : *Corporate Governance*

ε : Error Term

HASIL

Pada bagian ini membahas hasil dari uji normalitas, uji korelasi, uji asumsi MANOVA (*Multivariate Analysis of Variance*), dan hasil uji hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	CGI	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
RPT	0	,104	72	,051	,910	72	,000
	1	,216	13	,097	,911	13	,189
	2	,080	97	,143	,967	97	,015
ROA	0	,099	72	,074	,960	72	,023
	1	,104	13	,200*	,987	13	,998
	2	,056	97	,200*	,961	97	,006

Sumber: Hasil *output* SPSS

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas untuk setiap kategori variabel independen terhadap dua variabel dependen (RPT dan ROA).dari total keseluruhan sampel 182 terlihat bahwa nilai signifikansi setiap kategori variabel independen terhadap dua variabel dependen adalah lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data telah terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi

		CGI	RPT	ROA
CGI	Pearson	1	,018	,189*
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)		,811	,011
	N	182	182	182
RPT	Pearson	,018	1	-,214**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,811		,004
	N	182	182	182
ROA	Pearson	,189*	-,214**	1
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,011	,004	
	N	182	182	182

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil *output* SPSS

Berdasarkan data Tabel 3 menunjukkan hasil uji korelasi *product moment*. Hasil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan berarti dan lemah dengan ROA, namun tidak untuk RPT. Semua variabel dependen saling berhubungan, ditunjukkan dengan tanda (*).

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan nilai Box's M test adalah 57,49 dan signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05 maka H_0 yang menyatakan matrik *variance / covariance* sama ditolak dan menunjukkan bahwa matrik *variance / covariance* dari

variabel dependen adalah berbeda. Hasil yang diberikan dari uji ini melanggar asumsi MANOVA, namun hasil nilai F test robust walaupun menyalahi asumsi MANOVA, maka analisis masih dapat diteruskan.

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a	
Box's M	57,495
F	9,221
df1	6
df2	7667,187
Sig.	,000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + X

Sumber: Hasil *output* SPSS

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas

Levene's Test of Equality of Error Variances^a				
	F	df1	df2	Sig.
RPT	11,183	2	179	,000
ROA	7,692	2	179	,001

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + X

Sumber: *output* data SPSS

Tabel 5 menunjukkan hasil untuk variabel RPT adalah 0,000 dan ROA 0,001 keduanya lebih kecil dari 0,05 maka H_0 yang menyatakan varian sama ditolak dan menunjukkan varian dari variabel dependen adalah berbeda dan hal ini menyalahi

asumsi MANOVA (yang dikehendaki varian sama). Meskipun terjadi pelanggaran pada asumsi ini, MANOVA masih tetap robust dan analisis masih dapat diteruskan.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Uji Pengaruh Dua Subjek						
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	RPT	1,074 ^a	2	,537	,796	,453
	ROA	2,143 ^b	2	1,071	5,474	,005
Intercept	RPT	94,092	1	94,092	139,540	,000
	ROA	149,536	1	149,536	763,993	,000
CGI	RPT	1,074	2	,537	,796	,453
	ROA	2,143	2	1,071	5,474	,005
Error	RPT	120,700	179	,674		
	ROA	35,036	179	,196		
Total	RPT	342,952	182			
	ROA	306,322	182			
Corrected Total	RPT	121,773	181			
	ROA	37,178	181			

a. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = -,002)

b. R Squared = ,058 (Adjusted R Squared = ,047)

Sumber: Hasil *output* SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh adalah untuk variabel *Corporate Governance* terhadap ROA adalah sebesar 5,474 dengan signifikansi 0,005, maka H₁ diterima. Namun tidak untuk variabel RPT.

PEMBAHASAN

Pengaruh Praktik *Corporate Governance* terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap besaran transaksi dengan pihak berelasi pada perusahaan

terkonsentrasi dengan kepemilikan lebih dari 50% saham. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Utama (2015) yang menyatakan bahwa praktik *Corporate Governance* masih belum dianggap penting sebagai serangkaian mekanisme yang berfungsi mengurangi transaksi pihak berelasi yang merugikan dan hanya dianggap sebatas untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan di Indonesia pada umumnya memiliki grup perusahaan, serta fakta bahwa 71% kepemilikan perusahaan *go-public* adalah terkonsentrasi pada keluarga, sehingga dapat meningkatkan motivasi pemilik pendiri (pemegang saham mayoritas) untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi adalah demi kepentingan perusahaan dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Didukung dengan pendapat Tumbuan (dalam Lukviarman, 2016) yang menyatakan bahwa PT adalah subjek hukum mandiri, yaitu kepentingan PT diwakili oleh direksi, sehingga direksi haruslah mengabdikan kepada kepentingan PT (yaitu semua pemegang saham) bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham dan meski terjadi pergantian pemegang saham, para anggota direksi dan dewan komisaris maka tidak akan mempengaruhi PT. Loyalitas BOD kepada organisasi korporasi adalah tidak terkecuali untuk perusahaan yang kepemilikannya menyebar ataupun terkonsentrasi. Direksi sesuai dengan konsep *going concern* (kesinambungan usaha) menyebabkan munculnya motivasi pada semua direksi untuk mempertahankan posisinya atau jabatannya sebagai direksi, dengan menjalankan perusahaan sesuai visi misi.

Pengaruh Praktik *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Corporate Governance* berpengaruh positif dan lemah terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terkonsentrasi. Hasil dari

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Chauhan et al (2016) menyatakan bahwa praktik *Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, efek ini lebih menonjol pada perusahaan tempat pemilik pendiri memiliki kepemilikan yang lebih tinggi (terkonsentrasi). Penelitian ini juga sesuai dengan Kumaat (2013) bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Praktik *Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena dengan kepemilikan yang tinggi dapat mendorong independensi seorang dewan, yang selanjutnya dapat menggunakan praktik *Corporate Governance* yang efektif untuk meningkatkan dana eksternal dengan biaya lebih rendah (Chauhan, 2016). Mekanisme pengendalian di negara berkembang yang tidak berjalan secara efektif, menjadikan keberadaan pemilik mayoritas berperan sebagai mekanisme *governance* alternatif dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh problematika keagenan (Lukviarman, 2016: 174).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap ketiga variabel yaitu, praktik *Corporate Governance*, besaran RPT, dan ROAdapat disimpulkan bahwa, praktik *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Besaran transaksi Pihak Berelasi. Artinya praktik *Corporate Governance* masih belum dianggap penting sebagai serangkaian mekanisme yang berfungsi mengurangi transaksi pihak berelasi yang

merugikan dan hanya dianggap sebatas untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Praktik *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, praktik *Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena dengan kepemilikan yang tinggi dapat mendorong independensi seorang dewan, yang selanjutnya dapat menggunakan praktik *Corporate Governance* yang efektif untuk meningkatkan dana eksternal dengan biaya lebih rendah.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu sampel penelitian hanya pada perusahaan manufaktur saja, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian untuk seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI. Dapat menambahkan proksi untuk pengukuran besaran transaksi pihak berelasi yaitu menambahkan variabel seperti RPTSE (transaksi yang terkait RPT yang berasal dari laporan laba rugi).

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, T. dan F. (2015). Peran Kualitas Corporate Governance Terhadap Model Hubungan Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan Dengan Kinerja Perusahaan. *The 2nd University Research Coloquium 2015*, 339–350.
- Adi Setiawan, Y. D., & Fitria, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(3).
- Ardiansyah, M. K. (2016). Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia. *Privat Law*, IV(2). *Business Research Quarterly*, 20(1), 4–17. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.07.002>
- Chauhan, Y., Lakshmi, K. R., & Dey, D. K. (2016). Corporate governance practices, self-dealings, and firm performance: Evidence from India. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(3), 274–289. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.10.002>
- Cheung, Y. L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2006). Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong. *Journal*

of *Financial Economics*, 82(2), 343–386.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012>

- Handayani, I. R. (2014). Analisis Pengaruh Pembelian dan Penjualan kepada Pihak Berelasi dan Tidak Berelasi terhadap Laba Bersih pada Industri Otomotif dan Komponennya. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, IV(1), 1–11.
- Handayani, S. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bumn (Persero) Di Indonesia. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 183–198.
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, Jr. (1998). *Prinsip - Prinsip Manajemen Keuangam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kumaat, Lusye. (2013). Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17(1), 11-20.
- Lukviarman, Niki. (2016). *Corporate Governance*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- OECD. (1999). OECD Principles of Corporate Governance. *OECD Publications Service*. https://doi.org/10.1007/978-4-431-30920-8_10
- Sugiarto. (2009). *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Shinta, N. P. (2011). Eksplorasi Struktur Kepemilikan Saham Publik di Indonesia Tahun 2004 - 2008. *The Indonesia Accounting Review*, 1(2), 145–154.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 37–54.
- Yeh, Y. H., Shu, P. G., & Su, Y. H. (2012). Related-party transactions and corporate governance: The evidence from the Taiwan stock market. *Pacific Basin Finance Journal*, 20(5), 755–776. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2012.02.003>
- _____. Peraturan Kemenkeu dan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2009 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- _____. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi